

BAB IV

PELAKSANAAN STRATEGI MENARIK INVESTASI ASING KE PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam bab ini penulis akan membahas strategi-strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menarik investasi asing pada tahun 2013 - 2015 yang berada di bawah wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

A. Melakukan Reformasi Birokrasi

Strategi merupakan serangkaian langkah-langkah atau rencana yang telah dirancang dengan menghubungkan kekuatan organisasi dan lingkungan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menyusun strategi diperlukan adanya suatu tujuan sehingga terlihat jelas apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya. Untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan kekuatan strategis yang merupakan modal untuk mencapai tujuan utama tersebut.¹ Reformasi birokrasi dijadikan strategi untuk menarik investasi asing ialah dengan alasan birokrasi yang selama ini berjalan berdampingan dengan pelaksanaan aktivitas penanaman modal asing menjadi salah satu keluhan yang muncul dari pihak investor asing.² Sebagai calon investor mereka merasa kecewa dengan pelayanan izin investasi yang berbelit-belit dan memakan waktu lama, hal tersebut

¹ Mohtar Masoed. (1989). Loc.,cit.

² Tulus Tambunan. "Kendala Perijinan Investasi", dalam Kendala Perijinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah, 6 Februari 2008.hlm. 6.

sendiri juga terjadi akibat adanya perbedaan informasi komunikasi yang ada dari pihak birokrat investasi dengan pihak calon investor. Maka dari itu melakukan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang ramah yaitu keadaan investasi yang terjangkau dan profesional dengan memberikan kemudahan bagi investor asing dan calon investor asing, sehingga dalam waktu mereka menanamkan modal akan merasa dilindungi.

Alasan selanjutnya mengapa reformasi perlu dilakukan sebagai strategi menarik investasi asing ialah karena reformasi birokrasi juga memiliki pengaruh dari variabel lingkungan dan variable internalisasi sesuai teori penanaman modal asing. Variabel lingkungan sendiri terdiri dari tiga unsur yang mendukung yaitu ekonomi, non-ekonomi dan modal pemerintah. Variable ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan ketrampilan manajemen yang disebut *human capital*. Variabel non-ekonomi mencakup kondisi politik, sosial dan kondisi pemerintahan.³ Sedangkan variable internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan atau faktor spesifik pemilikan.⁴ Dalam hal ini setiap penanam modal diharuskan memiliki karakteristik yang khas yang ditujukan untuk memaksimalkan tingkat keuntungan sekaligus sebagai faktor yang membedakan dengan penanam modal lainnya.

³ Sidik Jatmika. Loc.,cit.

⁴Rugman, A. M. Loc.,cit.

Reformasi birokrasi memiliki pengaruh variabel lingkungan karena masalah yang ada dan perlu ditangani dengan reformasi birokrasi adalah masalah dalam fakto ekonomi maupun non ekonmi yang mencakup masyarakat lokal dengan sumber daya manusia (SDM) yang rendah karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan sehingga keerampilan yang dimiliki oleh masyarakat juga jauh dari yang diharapkan investor asing. Kemauan SDM masyarakat lokal menjadi masalah karena sesuai manfaat yang ingin diperoleh dari wilaya penanaman modal ialah dengan mengurangi pengangguran wilayah investasi melalui lowongan pekerjaan yang diberikan oleh aktivitas yang dilakukan oleh investor asing. Namun karena SDM mayarakat lokal yang rendah sehingga mempengaruhi kualitas pekerjaan mereka pada usaha yang mereka bantu dan pada akhirnya memberikan upah yang disesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan mereka sendri yang dianggap tidak sepadan bagi mereka. Bahkan persoalan terkait pelaksanaan regulasi hukum yang tidak sesuai dengan aktivitas penanaman modal yang berjalan saat ini.

Sedangkan variabel internalisasi berhubungan dengan reformasi birokrasi karena sesuai dengan maksud dari variabel internalisasi adalah keunggulan spesifik atau karakteristik khas yang ditujukan untuk memaksimalkan tingkat keuntungan sekaligus sebagai faktor yang membedakan dengan penanam modal lainnya. Maka, faktor pemerintah yang terbuka dengan segala kebijakan yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya menjadi salah satu faktor yang menentukan Penanaman Modal Asing (PMA) di suatu daerah. Dengan adanya teori penanaman modal Provinsi Jawa tengah diharapkan dapat mengetahui

bagaimana cara berinvestasi yang menguntungkan kedua belah pihak, Provinsi Jawa Tengah berupaya mencari simbol yang berbeda dengan daerah lain untuk meningkatkan daya saing iklim investasi yang ramah. Dengan melakukan upaya perbaikan birokrasi inilah, pemerintah memaksimalkan upaya daerahnya untuk menarik investor asing menanamkan modal di wilayahnya. Karena dalam menanamkan modal di suatu wilayah, calon investor asing mempertimbangkan beberapa hal seperti kondisi politik wilayah investasi, infrastruktur baik sarana dan prasarana serta tingkat SDM masyarakat lokal. Ketiga hal tersebut menjadi penting karena investor asing ingin memiliki rasa aman dan dilindungi ditempat mereka menanamkan modal, selanjutnya mereka ingin aktivitas penanaman modal asing ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tidak hanya pihak tuan rumah saja.

Strategi reformasi birokrasi digunakan sebagai strategi untuk menarik investor asing karena sesuai konsep penanaman modal untuk menarik investasi asing dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Variabel lingkungan sendiri dilakukan dengan membenahi manajemen birokrasi baik yang meliputi faktor ekonomi maupun non-ekonomi sehingga dapat meningkatkan fungsi produksi Provinsi Jawa Tengah. Dengan manajemen birokrasi yang baik, maka akan mempermudah aktivitas produksi. Sedangkan variabel internalisasi merupakan faktor yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki keunggulan spesifik yang dapat ditunjukkan kepada calon investor asing maupun investor asing sebagai kelebihan yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola kondisi internal Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan konsep penanaman modal yaitu spesifikasi khusus, dimana dengan membenahi birokrasi maka dapat dijadikan

spesifikasi khusus. Karena ketika birokrasi bagus maka akan dapat dijadikan keunggulan komparatif terhadap calon investor asing karena mereka akan merasa memiliki kepastian jaminan keamanan dalam aktivitas penanaman modal mereka⁵ Akan tetapi, apabila birokrasi yang ada itu buruk maka dapat dipastikan jika calon investor asing akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut, karena bagi mereka jaminan keamanan dan kualitas birokrasi yang bagus menjadi jaminan bagi mereka yang merupakan warga negara asing (WNA) yang mengolah sumber daya alam (SDA) di Indonesia khususnya Jawa Tengah.⁶ Kualitas suatu wilayah dapat dilihat dari kemampuan pemerintahan dalam menangani birokrasi mereka.

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terkait aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia (SDM).⁷ Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektifitas dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkial dan horizontal yang seimbang. Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis; agenda kebijakan; program dan kinerja kegiatan yang terencana. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang

⁵ David Osborne dan Peter Plastrik, "*Memangkas Birokrasi, Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*", terj. Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta: Penerbit PPM, 2000. hlm. 58.

⁶ David Osborne dan Peter Plastrik. (2000). Ibid. hlm. 62.

⁷ Said M. Mas'ud. (2007). "*Birokrasi di Negara Birokratis*". Malang: UMM Press. hlm. 36

profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional.⁸

Menurut Margaret Thatcher dalam buku David Osborne dan Peter Plastrik, reformasi birokrasi disebut juga dengan pembaruan (*reinvention*) yang menguahi DNA/inti organisasi pemerintah sehingga memiliki perilaku inovatif, secara terus menerus memperbaiki kinerja pelayanan publik. Reformasi birokrasi harus mampu mengubah lingkungan dan kondisi internal birokrasi publik menjadi kondusif bagi adanya pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dalam kehidupan politik dan ekonomi kinerja birokrasi publik menjadi isu yang strategis. Dalam kehidupan ekonomi reformasi birokrasi akan memperbaiki iklim investasi untuk membebaskan diri dari krisis ekonomi.⁹ Untuk melakukan perbaikan birokrasi terdapat 5 strategi yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Strategi inti, strategi ini berhubungan dengan tujuan yang meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengarahkan dengan menciptakan mekanisme baru sebagai langkah awal menjelaskan tujuan dan strategi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah memberikan penjelasan kepada calon investor asing tentang tujuan mereka selain sebagai organisasi yang bertanggung jawab pada penanaman modal asing, juga memiliki tujuan untuk membuat kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah dapat bersaing dengan Provinsi lain

⁸ Kuncoro M.M. (2016). "*Reformasi Birokrasi di Indonesia*". Kompasiana. Diakses dari https://www.kompasiana.com/amp/kuncoromm/reformasi-birokrasi-di-indonesia_55dda1f813311c22cbc5fe4 pada 10 Desember 2016.

⁹ David Osborne dan Peter Plastrik. (2000). Op.,cit. hlm. 32.

dalam bidang penanaman modal yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya realisasi investasi asing di Provinsi ini.

2. Strategi konsekuensi, untuk menerapkan konsekuensi atas kinerja organisasi melalui manajemen pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga terkait penanaman modal asing juga berkewajiban untuk mengendalikan persaingan investor asing pada masing-masing usaha yang mereka operasikan melalui kebijakan yang diberikan DMPTSP bagi pengawasan terhadap perusahaan maupun investor asing di Provinsi Jawa Tengah ialah dengan menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 3 bulan sekali.
3. Strategi pelanggan, untuk menciptakan pertanggungjawaban organisasi pemerintah terhadap pelanggan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah harus mengevaluasi setiap pilihan usaha yang dipilih oleh investor asing agar mereka tidak menyalahgunakan izin usaha mereka dalam bidang tertentu. Serta memperhatikan mutu perusahaan, akankah memberikan kepuasan bagi pelanggan akan hasil produksi yang ada atukah produksi mereka mamberikan dampak negatif sehingga menimbulkan masalah dan hambatan bagi perusahaan maupun lingkungan usaha investor asing yang pastiya akan menjadi pelanggan dari usaha tersebut.
4. Strategi kontrol, untuk memberdayakan organisasi dan pegawainya agar bisa berinovasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah harus memiliki peraturan perundang-undangan tentang kinerja birokrat mereka dan penanam modal. Dimana karyawan harus bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menuntut pegawainya untuk mampu melakukan inovasi dalam melakukan promosi potensi Jawa Tengah baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk pihak penanam modal selain diberikan peraturan sebagai landasan produksi mereka juga diberi kepercayaan akan usaha mereka dan meminta hasil pertanggungjawaban hasil produksi investor.

5. Strategi budaya, untuk mengubah perilaku, perasaan dan cara pikir. Perbaiki budaya yang dimulai dari budaya yang ada di lingkungan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan mengubah perilaku karyawan menjadi lebih inovasi melalui pelimpahan kekuasaan pada karyawan agar mereka merasa memiliki tanggungjawab lebih pada pekerjaan mereka setelah itu memberikan pujian atau penghargaan atas hasil kerja pegawai. Selain kepada pegawai atau karyawan, DPMPTSP juga berkewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat sekitar lingkungan penanaman modal untuk lebih menerima keberadaan investor asing yang memberikan efek positif seperti pertukaran teknologi dan memberikan perubahan keadaan ekonomi. Kebudayaan dalam organisasi juga dapat berupa penerapan sifat disiplin dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang ramah.¹⁰

¹⁰ David Osborne dan Peter Plastrik. (2000). *Op.,cit.* hlm. 48-49.

Maka dari itu untuk melakukan reformasi birokrasi terdapat beberapa faktor yang mendukung perbaikan birokrasi yang kurang tepat akibat masalah yang muncul dalam lingkup birokrasi, yaitu dengan meningkatkan iklim investasi yang ramah, melakukan perbaikan infrastruktur dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Dengan melaksanakan reformasi birokrasi yang diwujudkan dalam reformasi karpet hijau sesuai panduan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam upaya perbaikan birokrasi pelayanan investasi. Selanjutnya perbaikan infrastruktur guna mendukung reformasi birokrasi melalui tersedianya sarana dan pra-sarana pendukung aktivitas penanaman modal. Sarana dan pra-sarana yang mendukung sendiri diperuntukkan sebagai alat untuk mempermudah pergerakan manusia dan barang karena kegiatan penanaman modal yang dilakukan di luar wilayah asal penanam modal serta diperuntukkan bagi akses produksi maupun distribusi dalam aktivitas penanaman modal. Dan terakhir ialah mempersiapkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya persiapan SDA dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan musibah yang dapat terjadi agar selama investor asing menanamkan modal di wilayah tersebut merasa kondusif, karena bisa saja apabila SDA tidak dipersiapkan dapat menimbulkan bencana akibat faktor alam yang tersedia dari potensi yang ada. Sedangkan mempersiapkan SDM diperlukan agar pihak investor asing, wilayah aktivitas penanaman modal serta pemerintah wilayah tersebut merasa sama-sama diuntungkan satu sama lain. Karena keluhan masalah terdahulu dikarenakan, SDM yang kurang terampil sehingga investor asing harus menyeimbangkan peraturan produksi dengan kualitas SDM yang ada.

Dengan melakukan reformasi birokrasi seperti meningkatkan iklim investasi yang ramah, perbaikan infrastruktur dan melakukan penyiapan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Strategi-strategi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki kondisi internal Provinsi Jawa Tengah agar dapat menarik investor dan memandang bahwa Jawa Tengah memiliki lingkungan yang kondusif untuk menanamkan modal mereka dan merupakan wilayah yang layak diberi kepercayaan untuk melakukan penanaman modal. Pembinaan kondisi internal perlu dilakukan sebab menjadi salah satu pertimbangan utama dari investor asing karena tidak mungkin investor mau menanamkan modalnya di suatu daerah secara serta merta, tentu mereka akan mempertimbangkan untung rugi yang akan mereka dapatkan selama menanamkan modal di tempat tersebut.

1. Meningkatkan Iklim Investasi Yang Ramah

Iklim penanaman modal atau investasi adalah suatu kondisi pemberian pelayanan penanaman modal yang profesional. Sedangkan iklim investasi yang ramah meningkatkan suasana investasi yang terjangkau dan profesional dengan memberikan kemudahan bagi investor asing dan calon investor asing, sehingga dalam waktu mereka menanamkan modal akan merasa dilindungi. Sesuai penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan, meningkatkan iklim investasi yang ramah salah satunya ialah dengan melakukan reformasi karpet hijau, istilah ini menunjuk pada perumpamaan lampu hijau dalam rambu lalu lintas yang memberi kesempatan atau kelancaran bagi pengguna jalan. Pada pembahasan ini, reformasi karpet hijau memiliki makna pemberian fasilitas yang akan memberikan kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya di

Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Reformasi karpet hijau sebagai salah satu strategi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak Oktober 2015 lalu terdiri dari 3 macam kemudahan. Pertama, kemudahan layanan izin investasi 3 jam yang dikenal dengan “kemudahan layanan investasi 3 jam”, dalam layanan ini BKPM maupun DPMPTSP memberikan bonus 8 produk perizinan plus 1 surat *booking* tanah.¹¹ Terobosan baru ini akan membuat investor menerima 8 produk perizinan seperti izin investasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta pendirian perusahaan dan Surat Keterangan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 1 surat *booking* tanah atau surat keterangan peta informasi ketersediaan tanah. Bonus yang diberikan BPMD ini diberikan apabila calon investor telah mempekerjakan minimal 1.000 tenaga kerja lokal dan menanamkan investasi yang bernilai Rp 100 Miliar.¹²

Sebelum adanya reformasi karpet hijau, layanan izin investasi yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

- Melalui pendaftaran penanaman modal,
- Mengurus permohonan pendaftaran perluasan penanaman modal,

¹¹ Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2015). “*Reformasi Perbaikan Investasi Berkelanjutan*”. Badan Koordinasi Penanaman Modal, diakses dari <http://www.bkpm.go.id/publikasi/detail/investasi/reformasi-perbaikan-investasi-berlanjut> pada 18 Februari 2017.

¹² Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2015) “*Masuk Zona Hijau, Reformasi Layanan Investasi Berlanjut*.” Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Mengurus izin prinsip yang didapatkan dengan memulai kegiatan penanaman modal untuk memperoleh izin prinsip perluasan,
- Mengurus izin prinsip perubahan penanaman modal untuk melakukan perubahan ketentuan pada izin prinsip/perluasan sebelumnya,
- Meminta permohonan izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang disampaikan calon investor untuk mendapatkan izin Pemerintah agar dapat menanamkan modal di Indonesia.
- Mengurus izin usaha dan izin usaha perluasan sebagai izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi.
- Mengurus permohonan fasilitas penanaman modal sebagai bentuk permohonan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses investasi di Indonesia.
- Selanjutnya baru memperoleh izin dari BKPM maupun DPMPTSP dengan diterbitkannya rekomendasi.¹³

Dalam pelaksanaan izin layanan investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) yang merupakan badan yang menangani Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Sistem pelayanan satu atap ini

¹³ Wawancara dengan Abidin Achmad W., tanggal 3 Desember 2016 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat. Melakukan PTSP agar investor dapat mengurus perizinan maupun non-perizinan mereka melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah.¹⁴ Dalam mekanisme pengerjaannya, PTSP menggunakan media *online* yang telah dilengkapi oleh SPIPSE sebagai akses proses perizinan penanaman modal yang telah terintegrasi. Kemudahan lain yang ditawarkan dalam layanan izin investasi adalah Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang memberikan kemudahan kini hanya perlu mengurus izin prinsip saja sebelum memulai konstruksi penanaman modal sementara izin-izin lain dapat diurus sambil membangun infrastruktur yang akan dipergunakan dalam proses produksi.

Kedua, pemberian fasilitas dari BKPM dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal mempercepat impor mesin dan peralatan bagi investor yang sedang dalam tahap konstruksi¹⁵. Program reformasi karpet hijau yang kedua memiliki maksud agar penanam modal dapat menerima barang yang dibutuhkan dalam waktu singkat untuk proses produksi hanya melalui penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan oleh DPMPTSP melainkan dengan memeriksa dokumen saja. Akan tetapi SPPB dapat akan diterbitkan apabila perusahaan benar-benar dalam tahap konstruksi

¹⁴ Tulus Tambunan. (2008). Loc.,cit.

¹⁵ Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2015). “*Reformasi Perbaikan Investasi Berkelanjutan*”. Badan Koordinasi Penanaman Modal, diakses dari <http://www.bkpm.go.id/publikasi/detail/investasi/reformasi-perbaikan-investasi-berlanjut> pada 18 Februari 2017.

(pembangunan) gedung pabrik dengan melampirkan rencana pembangunan pabrik dan rencana pengadaan barang impor. Program ini diharapkan dapat menuntut perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan *good governance* serta menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku. Program reformasi birokrasi ini dikeluarkan sebagai salah satu strategi untuk menarik investor asing, karena sebelum keberadaan program ini kebanyakan investor asing mengeluhkan pada proses perizinan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu lama.

Dan yang ketiga berupa program kawasan industri ramah investasi sebagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Apabila penanaman modal akan dilakukan dalam lingkup industri harus tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan dan masyarakat. Lingkungan yang hendak ditempati akankah menyediakan potensi yang diharapkan dalam jumlah yang melimpah lalu akankah mendukung dan terjangkau oleh sarana dan pra-sarana yang diperlukan. Masyarakat yang menerima atau tidak merasa terganggu dengan adanya aktivitas penanaman modal asing di sekitar tempat tinggal mereka.

Dengan melakukan reformasi karpet hijau yang ditujukan pada pemberian kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Melalui reformasi karpet hijau yang dicetuskan oleh BKPM dan pelaksanaannya didukung oleh DPMPSTP memiliki kecenderungan untuk membuktikan bahwa badan penanaman modal di Jawa Tengah mampu memberikan pelayanan izin investai terbaik bagi para calon investor dan investor agar mereka semakin tertarik menanamkan modalnya di

Jawa Tengah dan merasa bahwa wilayah ini merupakan wilayah yang kondusif untuk menanamkan modal. Dengan didukung oleh konsekuensi badan penanaman modal agar mampu membuktikan kualitas dan kuantitas terhadap investor asing dalam menangani layanan perizinan yang telah dipermudah bahwa mereka mampu melakukan inovasi dengan tetap disesuaikan pada perilaku anggota badan penanaman modal dan investor. Bagi kepentingan para penanam modal asing maka selain iklim investasi tersebut, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan dan perlakuan tidak diskriminatif yang diberikan kepada investor dalam arena memperebutkan percaturan pasar. Wajar apabila pemilik modal asing menginginkan adanya perlindungan dan jaminan investasi atas ancaman terjadinya resiko nasionalisasi.

2. Perbaikan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu strategi sebagai pelancar roda perekonomian.¹⁶ Perbaikan infrastruktur diperlukan untuk memperlancar kegiatan usaha. Sehingga ketersediaan prasarana seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara, jalur kereta api, sarana komunikasi dan sumber energi seperti listrik maupun air dan fasilitas kesehatan terkait investasi. Semakin tersedianya infrastruktur yang memadai maka akan semakin menarik investor asing.¹⁷

Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah strategis karena Provinsi yang terletak di jantung Pulau Jawa memiliki akses melalui jalur darat, laut bahkan udara. Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan Bandar Udara Internasional Adi

¹⁶ Tullus Tambunan. (2008). *Loc.,cit.*

¹⁷ Wawancara dengan Purwanto., tanggal 3 Desember 2016 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Sumarmo di Solo dan Bandar Udara Ahmad Yani di Semarang, perbaikan akan dilakukan di Bandar Udara Ahmad Yani dengan menambah landasan pacu dan perluasan apron. Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dan Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap, perbaikan yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Emas disebabkan oleh sengketa letak pelabuhan swasta yang berada di sekitar Pelabuhan Tanjung Mas dengan melakukan pengecekan ulang pada izin swasta yang berada didekat Pelabuhan Mas.¹⁸

Dilalui beberapa ruas jalan utama Jawa Tengah dalam segi transportasi darat tergolong aman karena dilalui jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Pati-Surabaya-Banyuwangi, jalur Tegal-Purwokerto, jalur lintas selatan yang menghubungkan Bandung-Yogyakarta-Surakarta-Madiun-Surabaya serta jalur Semarang-Solo. Saat ini jalan tol Semarang - Solo sedang dalam proses, jalan ini menjadi bagian dari Jalan tol trans Jawa, yang melalui Ungaran-Salatiga-Boyolali-Solo. Disusul dengan pembuatan jalan tol Solo-Kertosono yang menghubungkan Semarang-Solo yang kemudian akan disambungkan ke Jawa Timur melalui tol Solo-Ngawi untuk memperlancar kegiatan ekonomi.¹⁹

Jawa Tengah menjadi provinsi yang pertama kali mengoperasikan jalur kereta api sejak tahun 1867.²⁰ Jalur kereta api di Provinsi ini melalui lintas utara (Jakarta-Semarang-Surabaya), lintas selatan (Bandung-Yogyakarta-Surabaya),

¹⁸ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2016). "*Peluang Investasi di Jawa Tengah*". Semarang: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. hlm. 26-28.

¹⁹ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2016). Ibid. hlm. 29

²⁰ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2016). Op.,cit. hlm. 33.

jalur Kroya-Cirebon dan jalur Solo-Gundih-Semarang. Jalur kereta api yang melalui beberapa kota strategis di Jawa Tengah, akan dilakukan perbaikan dengan membuat proyek yang dapat menjadikan jalur kereta bisa masuk area pelabuhan bahkan bandara. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan untuk memudahkan mobilitas investor dan memberikan rasa nyaman bagi investor atas dukungan sarana dan pra-sarana yang tersedia.

Gambar 4.1 Denah Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah

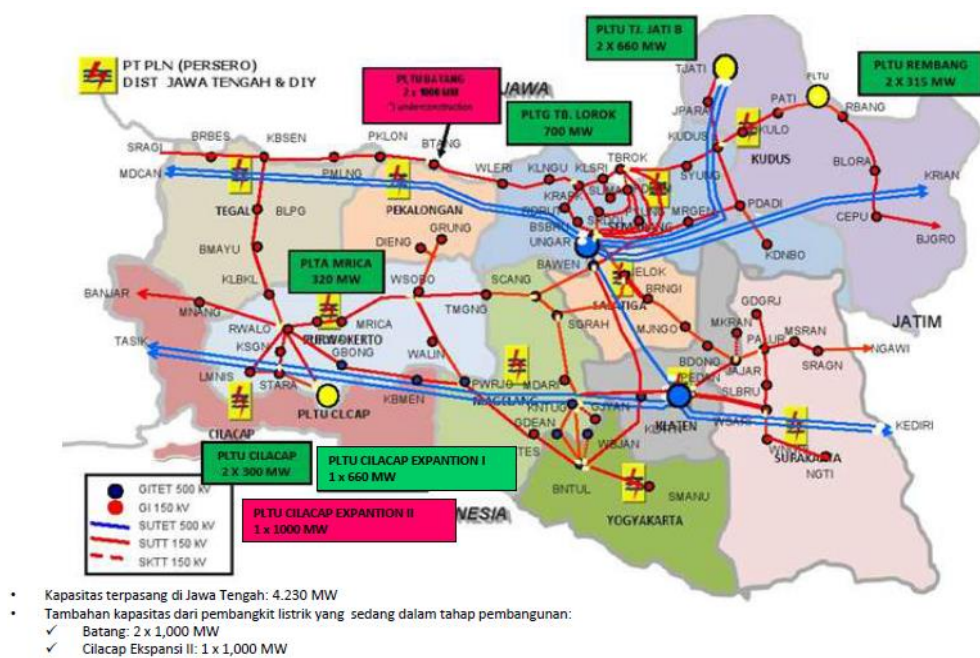


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana komunikasi di Jawa Tengah yang tergolong stabil tetap memerlukan perbaikan, dengan gelombang signal yang tidak merata di setiap wilayah yang terdapat proyek investasi asing maka pemerintah telah bekerjasama dengan pihak terkait sarana komunikasi untuk menambah jaringan untuk menyediakan tower signal agar proses komunikasi tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kekosongan komunikasi dalam transaksi yang berkaitan dengan

investasi asing. Selain itu, energi juga dibutuhkan dalam pendirian usaha terutama penanaman modal asing. Energi listrik menjadi salah satu energi yang sangat dibutuhkan. Di Jawa Tengah telah tersedia gardu listrik negara yang telah disediakan oleh PT. PLN (persero) yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.²¹

Gambar 4.2 Energi Listrik Jawa Tengah



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Mempersiapkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya alam (SDA) menjadi salah satu kompetensi yang harus dipersiapkan secara matang-matang untuk mengundang investor menanamkan modal di Jawa Tengah bahkan menjadi modal utama dalam investasi asing.

²¹ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2016). Op.,cit. hlm. 34

Dengan mempersiapkan SDA bukan berarti hanya menyediakan dan mempromosikan potensi yang dimiliki akan tetapi juga mengevaluasi dan melakukan pengontrolan terhadap potensi yang ada agar persediaan potensi tidak disalahgunakan oleh pihak asing.²² Serta tetap memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik Jawa Tengah maupun investor bahkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan keberadaan penanaman modal tersebut. Sebenarnya tanpa dipersiapkan pun SDA di wilayah-wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah ada dalam taraf yang menjamin dan menghasilkan. Akan tetapi, diperlukan pembenahan terhadap SDA yang tersedia dengan cara merawat lingkungan sekitar wilayah potensial dan melindunginya dengan peraturan perundang-undangan agar terlindungi dari tangan-tangan jahil manusia sekitar wilayah tersebut. Singkatnya, interaksi antara manusia dan lingkungan sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas SDA yang telah tersedia.

Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini menjadi pertimbangan lain investor untuk bersedia menanamkan modalnya di lokasi tersebut. Karena pendirian usaha penanaman modal asing yang dilakukan oleh investor asing juga memperhitungkan faktor pekerja yang menjadi salah satu syarat agar permohonan investor asing menanamkan modalnya di Jawa Tengah dapat terpenuhi. Akan tetapi kendalanya ialah kualitas dari tiap-tiap individu yang berbeda dan tingkat pendidikan yang rendah membuat investor ragu akan kemampuan pekerja lokal. Maka dari itu, tidak sedikit investor yang

²² Wawancara dengan Abidin Achmad W. di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 3 Desember 2016.

mempekerjakan tenaga kerja asing dalam usaha mereka dengan alasan untung rugi. Namun apabila dipahami secara saksama dan usaha yang dilakukan dalam jangka waktu panjang, maka investor seharusnya tidak perlu khawatir karena pekerja tentu akan memahami tugas yang mereka peroleh selama tugas yang mereka dapat tidak melampaui batas wajar sebagai pekerja. Kelebihan mempekerjakan tenaga kerja lokal ialah upah yang minim jadi jika kita tilik lebih dalam, investor tetap mendapatkan untung yang besar ditengah kendala SDM.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengadaan sekolah kejuruan industrial, ekonomi, teknologi dan bahasa, Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat dibangun secara sinergi antar unsur-unsur pelaku ekonomi yang ada di daerah.²³ Dalam hal ini proses sosial politik, menjadi proses yang menggambarkan hubungan lembaga sosial dalam sistem sosial daerah. Baik pranata ekonomi, sosial masyarakat, pemerintah serta masyarakat itu sendiri. Semakin dekatnya pranata-pranata dalam sistem sosial daerah maka semakin stabil kondisi sosial daerah tersebut.

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi peningkatan iklim investasi yang ramah melalui reformasi karpet hijau, perbaikan infrastruktur dan menyiapkan SDA serta SDM menjadi relevan dengan faktor lingkungan sesuai teori penanaman modal asing karena beberapa alasan. Reformasi karpet hijau yang telah berjalan memberikan perubahan bagi pelayanan izin investasi yang merupakan bagian dari kualitas

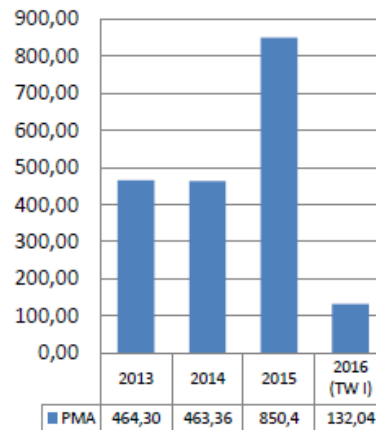
²³ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2016). Op.,cit. hlm. 39.

pelayanan publik yang mampu menjadi bukti bahwa birokrasi di Provinsi Jawa Tengah sejak diberlakukannya Reformasi Karpas Hijau ini dalam hal pelayanan perizinan menjadi lebih kondusif. Dalam pelaksanaannya juga mempertimbangkan faktor ekonomi seperti calon investor harus mempekerjakan minimal 1.000 tenaga kerja lokal dan menanamkan investasi yang bernilai Rp 100 Miliar. Sedangkan faktor non ekonomi yang dilaksanakan dalam strategi ini adalah memberikan kemudahan dalam mengurus izin dimana penanaman modal dapat dilakukan sambil mengurus izin-izin lain serta membangun infrastruktur yang akan dipergunakan dalam proses produksi.

Sedangkan apabila disesuaikan dengan variabel internalisasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang kemudian menghasilkan keunggulan spesifik yaitu proses perizinan yang tidak berbelit-belit, maka dapat kita lihat hasil dari upaya mempermudah pelayanan perizinan ini juga berdampak pada realisasi investasi asing tahun 2013-2015. Strategi reformasi birokrasi sendiri dilaksanakan sebagai modal utama untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Karena dengan kondisi birokrasi yang sudah mumpuni, akan menjadi pertimbangan bagi calon investor.

Gambar 4.3 Realisasi PMA Jawa Tengah Tahun 2013-2015

**Penanaman Modal Asing / PMA
(dalam Juta USD)**



Jml Proyek	148	224	608	78
Serapan Naker	74,553	54,741	76,300	9,646

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai data yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2014 angka realisasi menunjukkan penurunan sebanyak 0,94 juta US\$. Padahal proyek yang dipegang pada tahun 2014 meningkat sebanyak 76 proyek dibandingkan dengan tahun 2013. Hal tersebut bisa saja terjadi karena nilai produksi yang bergantung pada kurs maupun nilai produksi yang sedang anjlok. Sedangkan pada tahun 2015, realisasi investasi di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang drastis yaitu dengan sejumlah 384 proyek yang ditangani dan penghasilan yang meningkat 387,04 US\$. Hasil yang dicapai pada tahun 2015 sangat memuaskan karena menjadi satu pembuktian bahwa Jawa Tengah yang terbuka dengan penanaman modal mendapat simpati yang cukup tinggi dari pihak-pihak asing.

B. Melakukan Promosi Melalui Diplomasi Dalam Bentuk *Business Forum* dan *International Meeting*

Untuk mengoptimalkan strategi reformasi birokrasi yang dijalankan sebagai modal menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah, maka didukung metode paradiplomasi. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “sub-state” atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Metode paradiplomasi yaitu pemerintah Jawa Tengah melakukan hubungan luar negeri dengan investor asing untuk meningkatkan kapasitas daerah, hubungan tersebut dijalankan melalui mekanisme *business plan* melalui pelaksanaan *business forum* dan *international meeting*. *Business forum* merupakan wadah atau tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan dalam hal bisnis untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum bisnis. Sedangkan *international meeting* adalah pertemuan individu maupun sekelompok orang yang berasal dari berbagai negara di dunia yang membahas suatu masalah dengan satu tujuan yang sama. Dalam hal ini *business forum* yang dilaksanakan adalah *Central Java Business Expo (CJBE)* sedangkan *international meeting* yang dilakukan adalah *Central Java Investment Bussiness Forum (CJIBF)*.²⁴

²⁴ Wawancara dengan Alif, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 April 2017.

Melalui dua strategi promosi DPMPTSP Jawa Tengah menyimpan harapan besar agar semakin banyak investor asing yang menanamkan modal di Provinsi Jawa Tengah. Dalam mempermudah pelaksanaan beberapa strategi tersebut di atas, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah tentunya oleh Bidang Kerjasama dan Promosi, karena mereka memiliki wewenang untuk mempromosikan potensi Jawa Tengah di lingkungan nasional dan internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan promosi untuk meningkatkan investasi asing adalah sebagai berikut:²⁵

a. Memahami investasi asing.

Investasi asing seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya merupakan aktivitas yang dilakukan oleh investor asing atau yang sumber pembiayaan usahanya berasal dari pihak asing untuk mengadakan barang modal saat sekarang dan dapat menghasilkan produk baru di masa mendatang.

b. Menciptakan strategi promosi investasi.

Menciptakan strategi promosi menjadi unsur utama yang harus ada dalam kegiatan promosi ini. Karena keberhasilan promosi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah tergantung pada strategi yang dilakukan oleh representatif dengan cara diplomasi yang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi pelaksanaan promosi.

²⁵ Salim H.S dan Budi Sutrisno. (2008). Op.,cit. hlm 59-62.

c. Membangun kemitraan yang efektif.

Membangun hubungan kerjasama antara pihak pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah maupun swasta atau investor asing yang dapat berjalan lancar serta mencapai tujuan utama menjadi salah unsur yang harus dipertahankan.

d. Memperkuat citra daerah dan lokasi investasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan promosi terlebih dahulu sebaiknya memberikan deskripsi mengenai keunggulan-keunggulan daerah dan lokasi investasi yang disertai bukti nyata baru dideskripsikan kelemahan-kelemahannya tetap disertai dengan alasan yang mengakibatkan kelemahan tersebut dapat terjadi di wilayah potensial investasi tersebut.

e. Meningkatkan pelayanan investor.

Meningkatkan pelayanan terhadap investor maupun calon investor dapat dilakukan dimana representatif dapat mengadakan pertemuan dengan calon investor untuk membahas kemudahan izin yang kini telah tersedia di *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah sehingga investor asing tidak perlu susah payah untuk datang langsung ke Jawa Tengah.

f. Memanfaatkan teknologi informasi.

Dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu kemudahan untuk mengakses potensi yang tersedia di Provinsi Jawa Tengah. Dalam *website* tersebut juga tersedia perkembangan investasi di tiap-tiap daerah melalui liputan singkat yang dirangkum oleh operator.

Forum bisnis merupakan salah satu metode diplomasi yang yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah untuk mempromosikan potensi yang tersedia di Jawa Tengah agar investor asing tertarik menanamkan modalnya. Pada saat promosi ini perwakilan akan menunjukkan macam-macam potensi yang tersedia, jumlah keuntungan yang didapat ketika menanamkan modal di Jawa Tengah, profil wilayah dengan potensi unggulan bahkan menampilkan hasil industri yang dapat ditampilkan seperti olahan buah dan buah yang diawetkan, makanan ringan, minuman dalam kemasan, rambut palsu, bulu mata palsu, alas kaki baik sepatu maupun kaus kaki, prosuk tekstil olahan baik benang maupun bentuk pakaian jadi, minyak atsiri dan *furniture* atau hasil mebel buatan wilayah potensi.

Central Java Business Expo (CJBE) diadakan 2 tahun sekali pada tahun ganjil.²⁶ Jadi terkait penulisan skripsi ini, hanya pada tahun 2013 dan 2015 diadakan CJBE yang tentunya bertempat di Provinsi Jawa Tengah. CJBE dilakukan dengan

²⁶ Wawancara dengan Alif, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 April 2017.

beberapa tujuan seperti untuk membandingkan apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan provinsi lainnya, sebagai salah satu strategi promosi investasi dengan memperkenalkan potensi masing-masing Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah serta sebagai salah satu akses untuk meningkatkan kerjasama dengan Provinsi lain melalui pertukaran pengalaman dan informasi dalam meningkatkan investasi.

Sedangkan *Central Java Investment Bussiness Forum (CJIBF)* yang pertama dilaksanakan pada tahun 2004 ini diadakan tiap tahun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagai acara untuk memamerkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan uangnya di Provinsi Jawa Tengah. *Central Java Investment Bussiness Forum (CJIBF)* sendiri merupakan salah satu strategi unggulan Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah yang dilaksanakan untuk:

1. Mempromosikan potensi dan peluang investasi di Jawa Tengah kepada para investor potensial baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Mempertemukan secara langsung antara Kepala Daerah dengan pelaku usaha dan investor.
3. Memfasilitasi para calon investor yang akan menanamkan modalnya ke Jawa Tengah.

4. Memperkenalkan profil daerah secara komprehensif dalam rangka membangun citra Jawa Tengah seagai daerah tujuan wisata.²⁷

Untuk membantu metode paradiplomasi yang dijalankan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan cara promosi pembantu dengan menyebarkan informasi melalui media cetak maupun elektronik.²⁸ Media merupakan sarana komunikasi sekunder yang berarti penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media. Cara komunikasi sekunder ini dilakukan karena media pertama tidak bisa kagi mencapai komunikan yang tempatnya terlampau jauh dan jumlah dari komunikan terlampau banyak sehingga dengan menggunakan komunikasi sekunder diharapkan dapat menjangkau komunikan yang letaknya berjauhan. Pentingnya peranan media dalam kegiatan promosi ini disebabkan karena promosi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi kepada khalayak ramai yang menajdi sasaran dari kegiatan promosi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan kegiatan promosi melalui pembuatan bahan-bahan promosi dan melalui *website*. Dengan pembuatan bahan-bahan promosi ini meliputi brosur yang dibagikan pada acara CJIBF maupun CJBE serta majalah. Dimana pembuatan bahan-bahan ini diharapkan para investor mengetahui cakupan potensi yang ada di setiap wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pembuatan majalah sendiri sebagai suatu metode promosi yang sangat tepat, karena

²⁷ Wawancara dengan Alif di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 April 2017.

²⁸ Takdir Ali Mukti. 2013. Op.,cit. hlm. 52.

majalah yang berisi promosi investasi dikirimkan ke luar negeri dan rekan yang bekerjasama dengan Jawa Tengah dalam melihat secara lebih lengkap daripada di *wesite* potensi yang ada di wilayah tersebut.

Sebelum brosur maupun majalah disebarakan terlebih dahulu perlu dilakukan suatu proses yang dimulai dari pengumpulan data yang terbaru sampai proses pembuatan brosur maupun majalah.²⁹ Dalam pembuatannya harus memenuhi syarat pembuatan yang ditetapkan seperti disesuaikan dengan sistematika; mencantumkan wilayah atau potensi yang dipromosikan; cetakan harus menarik dan disertai lampiran foto; isi brosur atau majalah harus singkat padat dan jelas mencakup semua informasi secara menyeluruh tentang potensi, keuntungan dan sarana pra-sarana yang tersedia. Kemudian brosur maupun majalah yang dibuat dan disebarakan di dalam dan luar negeri melalui hotel dan agen-agen perjalanan melalui pameran ataupun kegiatan-kegiatan promosi di dalam dan luar negeri. Dapat juga melalui pos untuk kedubes negara yang bekerjasama dengan Indonesia.

²⁹ Wawancara dengan Alif di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 April 2017.